

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang salah satu yang menjadi kegiatan utama negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan negara kita Indonesia. Salah satu yang harus dilihat dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah dibidang ekonomi. Perkembangan sektor usaha saat ini berkembang cukup pesat di setiap negara berkembang. Persaingan usaha yang dihadapi para pelaku usaha sangatlah tinggi karena perekonomian yang tidak menentu karena persaingan secara global tersebut. Akses keuangan merupakan pilar utama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan akses ke layanan keuangan formal, individu dan UMKM dapat mengelola arus kas, mengatasi guncangan ekonomi (seperti penyakit atau bencana alam), dan berinvestasi dalam pendidikan atau usaha produktif. Misalnya, petani kecil bisa mengakses kredit untuk membeli bibit unggul, sementara pedagang mikro dapat menggunakan layanan pembayaran digital untuk memperluas jangkauan bisnis. Bank Dunia mencatat bahwa inklusi keuangan berkorelasi positif dengan pertumbuhan PDB per kapita, karena mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang sering kali berbunga tinggi dan eksploitatif.

Akses keuangan (*financial access*) merujuk pada kemampuan individu, rumah tangga, dan bisnis terutama yang berada dalam kelompok rentan atau terpinggirkan—untuk memperoleh dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara terjangkau, adil, dan berkelanjutan. Layanan ini mencakup tabungan, kredit, asuransi, pembayaran, transfer dana, serta investasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem

keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, mengelola risiko, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Demirgüç-Kunt, Thorsten Beck, dan Patrick Honohan (World Bank), dalam publikasi *Finance for All?* (2008), trio ekonom Bank Dunia ini mendefinisikan akses keuangan sebagai kemampuan individu dan bisnis untuk menggunakan layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, dan asuransi. Mereka membedakan antara akses (*availability*) dan penggunaan (*usage*), di mana akses tidak selalu diikuti penggunaan karena faktor seperti preferensi budaya atau kurangnya kebutuhan. Misalnya, sebagian masyarakat memilih bertransaksi tunai atau menghindari produk keuangan berbasis bunga karena alasan agama. Namun, mereka juga mengidentifikasi eksklusi finansial involunter akibat hambatan struktural seperti diskriminasi, infrastruktur terbatas, atau regulasi yang rumit.

Joseph Stiglitz dan Andrew Weiss (Teori Asimetri Informasi) Stiglitz dan Weiss, peraih Nobel Ekonomi, menganalisis akses keuangan melalui lensa asimetri informasi dalam pasar kredit. Dalam makalah seminar mereka (1981), mereka menjelaskan bahwa seleksi advers (peminjam berisiko tinggi lebih aktif mencari pinjaman) dan moral hazard (peminjam mengalokasikan dana secara tidak bertanggung jawab) menyebabkan penjatahan kredit (*credit rationing*). Bank cenderung membatasi pinjaman meskipun ada permintaan, karena kenaikan suku bunga justru meningkatkan risiko gagal bayar. Teori ini menjelaskan mengapa kelompok berpenghasilan rendah atau UMKM sering kesulitan mengakses kredit formal, sekaligus menyoroti pentingnya inovasi seperti teknologi identifikasi digital untuk mengurangi risiko asimetri informasi.

Dalam penelitian Ibor, et al (2015) suatu usaha tidak mampu mencapai tahap pertumbuhan dalam siklus kehidupan usahanya dari sisi keuangan umumnya disebabkan karena

kurangnya akses keuangan. Ketidakmampuan itulah yang menyebabkan tingkat pertumbuhan UMKM menurun dan tidak memiliki manfaat keunggulan daya saing. OECD (2006) & IFC (2010) berpendapat bahwa akses ke keuangan diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Literatur telah banyak yang menyatakan bahwa kemampuan usaha dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan usaha (Binks dan Ennew, 1996; Bygrave dan Zacharakis, 2008; Grande, Madsen, dan Borch, 2011; Adomoko et al., 2016)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha yang dikelola oleh perorangan atau kelompok dengan skala produksi dan modal yang terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kategori: usaha mikro, kecil, dan menengah, yang dibedakan berdasarkan omset tahunan dan nilai kekayaan bersih. Usaha mikro biasanya memiliki omset maksimal Rp300 juta per tahun dan aset hingga Rp50 juta, sementara usaha kecil memiliki omset antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar dan aset Rp50 juta hingga Rp500 juta. Usaha menengah memiliki omset Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar dan aset Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian karena kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Di Indonesia, (menurut data Kementrian UMKM per Desember 2024), terdapat 66,5 juta unit usaha mikro kecil di Indonesia. Jumlah usaha besar sekitar 5550 unit usaha atau 0,01%. UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap PDB nasional, dengan nilai mencapai Rp9.300 T. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor non-migas mencapai 15%, yang sebagian besar berasal dari sektor makanan, kerajinan tangan dan produk tekstil.. Selain itu, UMKM juga berperan

dalam mendorong inovasi dan kreativitas, terutama di sektor kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan teknologi digital..

Namun meskipun demikian, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, dan kurangnya kemampuan manajemen bisnis. Banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman bank karena tidak memiliki agunan atau catatan keuangan yang baik. Selain itu, persaingan dengan produk impor dan perusahaan besar seringkali menyulitkan UMKM untuk berkembang. Kurangnya pemahaman tentang digital marketing dan teknologi juga menjadi kendala dalam memperluas pasar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan lembaga keuangan sangat dibutuhkan, misalnya melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau pelatihan kewirausahaan. Hal ini dikarenakan berbagai masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, serta kesulitan dalam pemasaran.

Definisi Literasi keuangan (financial literacy) itu sendiri menurut Okello et al (2017) adalah kemampuan untuk memperoleh, memahami dan mengevaluasi informasi yang relevan yang diperlukan untuk membuat keputusan dan pilihan keuangan dengan kesadaran akan kemungkinan konsekuensi keuangan. Sedangkan literasi keuangan menurut OJK adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Dengan definisi ini diharapkan konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat luas tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan, serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki

perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi suatu negara yang meliputi pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan akan lebih mudah dicapai bila penduduk negara tersebut memiliki tingkat literasi keuangan tinggi. Tingginya tingkat literasi keuangan diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan karena dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan maka masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Manfaat literasi keuangan dari sisi makro ekonomi juga sangat penting karena semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat maka semakin banyak masyarakat yang akan menggunakan produk dan jasa keuangan. Mengingat kurang optimalnya akses keuangan maka perlu diidentifikasi pertumbuhan UMKM ditinjau dari efek instrumen literasi keuangan sebagai akses pendalaman edukasi keuangan sehingga ketika faktor-faktor pemicu pertumbuhan UMKM dan akses keuangan sebagai sarana meningkatnya pertumbuhan UMKM dapat diidentifikasi, maka diperlukan langkah lanjutan dalam meningkatkan akses keuangan di Indonesia.

Penelitian mengenai hubungan antara akses keuangan dan pertumbuhan UMKM telah menemukan beberapa hasil yang berbeda. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abe & Batsaikhan (2015), Lee & Cowling (2014), 13 dan Goldhausen (2017) menemukan adanya hasil yang positif signifikan pada hubungan Akses keuangan dan pertumbuhan UMKM. Sedangkan penelitian Sibanda & Shava (2017) dan Zidana (2015) menunjukkan hubungan akses keuangan dan pertumbuhan UMKM dengan hasil negatif signifikan. Selanjutnya, penelitian mengenai hubungan literasi keuangan dan pertumbuhan UMKM menemukan beberapa hasil

penelitian. Penelitian sebelumnya Fitria dkk (2018), Mwaniki (2018) dan Eniola (2017) memperoleh hasil positif signifikan antara hubungan literasi keuangan dan pertumbuhan UMKM. Sedangkan penelitian lain Eke dan Raath, Olawale dan Garwe (2010) dan Kusumadewi (2017) ditemukan hasil yang negatif signifikan diantara hubungan literasi keuangan dan pertumbuhan UMKM. Pertumbuhan UMKM menjadi acuan dalam melihat keberhasilan UMKM salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah mudahnya akses keuangan yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Faktor literasi keuangan juga menjadi penentu sukses atau tidaknya masyarakat dalam berbisnis dan literasi keuangan sudah tidak asing lagi terdengar dalam perbedaan penelitian terdahulu bahwasannya konstruk tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan UMKM secara langsung sementara perbedaan penelitian-penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah literasi keuangan dijadikan sebagai determinan dari akses keuangan dan juga mengidentifikasi efek tidak langsung apakah mampu melemahkan atau menguatkan hubungan antara akses keuangan terhadap pertumbuhan UMKM penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya telah dijabarkan bahwa terdapat research gap (kesenjangan penelitian) dari hasil penelitian sebelumnya terkait hubungan antara variabel yang diteliti dengan pertumbuhan UMKM sebagai fokus penelitian. Serta, masih jarang penelitian yang menggunakan variabel moderasi literasi keuangan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hubungan antara akses keuangan dan pertumbuhan UMKM, dan juga ingin mengetahui tingkat literasi keuangan masyarakat apakah mampu meningkatkan kesejahteraan, karena dipercaya bertambahnya tingkat literasi keuangan maka masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan keuangan keluarga atau pribadi menjadi lebih optimal.

Di Kecamatan Ende Selatan, UMKM didominasi oleh sektor kelautan, pertanian, perdagangan kecil, dan kerajinan tangan. Di wilayah ini masyarakat, masih beroperasi secara tradisional dengan skala subsisten, dan terbatasnya kapasitas manajerial. Salah satu tantangan struktural yang dihadapi adalah keterbatasan akses keuangan formal. Data Dinas Koperasi dan UMKM di NTT mengungkapkan bahwa sekitar 60% UMKM di NTT merupakan UMKM pemula dimana masih menghadapi tantangan dalam akses pembiayaan dari keuangan formal. Mayoritas UMKM masih bergantung pada pendanaan informal, seperti pinjaman keluarga atau rentenir, dengan bunga tinggi yang membebani cash flow bisnis. Ditambah lagi diduga, mayoritas masyarakat masih minim tentang pentingnya literasi keuangan dalam berbisnis.

Secara teoritis, akses keuangan seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan UMKM, namun pada praktiknya banyak pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya meskipun telah mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan. Kondisi ini diduga kuat terkait dengan faktor literasi keuangan yang belum memadai di kalangan pelaku UMKM. Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber pembiayaan yang tersedia. Banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam mengelola arus kas, membuat perencanaan keuangan, atau bahkan memahami syarat dan ketentuan produk keuangan yang mereka gunakan. Akibatnya, akses keuangan yang seharusnya menjadi solusi justru tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha.

Penelitian ini penting dilakukan karena mengisi celah dalam kajian sebelumnya yang cenderung fokus pada hubungan langsung antara akses keuangan dan pertumbuhan UMKM tanpa mempertimbangkan faktor literasi keuangan sebagai variabel yang memoderasi hubungan tersebut. Padahal, dalam konteks lokal seperti Kecamatan Ende Selatan, aspek literasi keuangan ini sangat krusial mengingat karakteristik pelaku UMKM yang sebagian besar berasal dari latar

belakang pendidikan terbatas dan bergerak di sektor-sektor tradisional, ditambah lagi peneliti melakukan penelitian ini bukan hanya untuk memenuhi syarat akademis, tetapi karena adanya masalah nyata : banyak UMKM di Ende Selatan yang butuh dana tapi tidak punya akses dan mereka yang punya akses sering kali gagal mengelola dananya karena kurang ilmu (literasi). Penelitian ini ingin membuktikan bahwa Akses + Literasi = Pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah *financial access* (akses keuangan) sebagai variabel independen. Pertumbuhan UMKM sebagai variabel dependen dan literasi keuangan sebagai variabel moderasi, yang diukur dengan indikator. Objek penelitian yang digunakan adalah pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Ende selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul : ***“Pengaruh Financial Access Terhadap Pertumbuhan UMKM dengan Moderasi Literasi Keuangan (Studi Empiris terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Ende Selatan).***

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka masalah penelitian adalah pengaruh financial access terhadap pertumbuhan UMKM dengan moderasi literasi keuangan.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, maka persoalan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah *financial access* berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Ende Selatan ?
2. Apakah literasi keuangan memoderasi pengaruh *financial access* terhadap pertumbuhan UMKM di Kecamatan Ende Selatan ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial access* terhadap UMKM di Kecamatan Ende Selatan.
2. Untuk mengetahui efek moderasi literasi keuangan terhadap pengaruh *financial access* pada pendapatan UMKM di Kecamatan Ende Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen keuangan, UMKM, dan studi literasi keuangan. Secara spesifik manfaat akademiknya adalah:

- a. Menambah referensi ilmiah terkait kajian tentang pengaruh akses keuangan (*financial access*) terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Indonesia, khususnya di daerah Ende Selatan yang selama ini belum banyak diteliti secara empiris.
- b. Memperkaya literatur akademik mengenai peran literasi keuangan sebagai variabel moderasi dalam hubungan *financial access* terhadap pertumbuhan UMKM, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama maupun bidang terkait.

- c. Menguji dan memperkuat teori-teori yang berkaitan seperti teori akses keuangan, teori pertumbuhan usaha, dan teori literasi keuangan, dengan mengkontekstualisasikan teori tersebut dalam kondisi nyata di tingkat UMKM daerah.
- d. Memberikan gambaran empiris tentang bagaimana financial access dan literasi keuangan secara bersama-sama memengaruhi kinerja dan perkembangan UMKM, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan model-model bisnis berbasis keuangan di lingkungan akademik.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang dapat dirasakan langsung oleh para pelaku usaha, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan UMKM, yaitu:

a. Bagi Pelaku UMKM :

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya akses keuangan dan literasi keuangan dalam mengembangkan usaha. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM dalam mengambil keputusan keuangan, mengakses layanan perbankan atau keuangan lainnya, serta meningkatkan kapasitas literasi keuangan untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait :

Memberikan masukan dan data empiris bagi pemerintah daerah Kabupaten Ende, khususnya di Kecamatan Ende Selatan, dalam merumuskan kebijakan atau program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, baik melalui peningkatan akses keuangan maupun edukasi literasi keuangan.

c. Bagi Lembaga Keuangan:

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperluas layanan keuangan yang lebih inklusif bagi UMKM serta merancang program pelatihan literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di wilayah Ende Selatan.

d. Bagi Komunitas Bisnis dan Stakeholder UMKM:

Menjadi informasi penting tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat hubungan financial access dengan pertumbuhan usaha, sehingga stakeholder UMKM dapat menyusun strategi kolaborasi, kemitraan, atau pengembangan program pendampingan usaha yang berorientasi pada peningkatan kapasitas keuangan UMKM.